





Kebolehan melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap menjadi ijtihad para hakim Pengadilan Agama karena tidak diatur dalam undang-undang Perkawinan di Indonesia maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun suami istri masih terikat dalam perkawinan yang sah, penulis merasa ikrar talak yang dilakukan bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap menimbulkan beberapa kemudharatan yaitu berupa perpanjangan masa *'iddah* dan menimbulkan keinginan untuk berpisah menjadi berkurang yang terkadang akan memberatkan salah satu pihak. Kemungkinan-kemungkinan ini penulis harapkan menjadi pertimbangan para hakim Pengadilan Agama apakah talak memang sebagai solusi bagi rumah tangga pihak-pihak yang berperkara atau bahkan akan mendatangkan kemadharatan bagi perkawinan mereka. Karena suatu putusan hakim tidak hanya harus memenuhi asas kepastian hukum (*rechtsecherheit*) tapi juga asas keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Ketiga hal ini harus mendapatkan perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit mewujudkannya.